

eJournal Ilmu Pemerintahan, 2023, () :
ISSN 2541-674x (Cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
©Copyright 2023

**SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMU (KPU) KOTA
BONTANG DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018**

Victor Valentino Mengi, Anwar As, Budiman

*eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 11 ,
Nomor 1 , 2023*

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

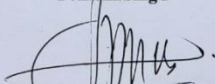
Judul Skripsi : Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Bontang dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018

Nama : Vichor Valentino Mengi
NIM : 1502025074
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Ilmu
Pemerintahan Fisip Unmul.

Samarinda, 5 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Anwar As., S.Sos., MM
NIP. 19770712 200501 1 003

Pembimbing II



Budiman, S.IP., M.Si
NIP. 19710226 200212 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PROGRAM STUDI S1 FISIPOL

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Ilmu Pemerintahan	Bagian Program Studi Ilmu Pemerintahan
Volume :	
Nomor :	
Tahun :	
Halaman :	

SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BONTANG DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

Vichtor Valentino Mengi¹, Anwar As,² Budiman,³

Abstrak

Penelitian ini ingin mengetahui Sosialisasi Politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif, Kota Bontang dari hasil penelitian ada perbedaan yang signifikan antara pemilu tahun 2013 dan tahun 2018. Jumlah daftar pemilih tetap pada Pilkada tahun 2013 sebanyak 125.753 orang, sementara pada tahun 2018 sebanyak 114.111 orang. Jika dibandingkan lebih banyak 11.642 orang daftar pemilih tetap Pilkada Tahun 2013 dibandingkan Pilkada Tahun 2018. Pada Pilkada Tahun 2013 di Kota Bontang partisipasi pemilih sebanyak 91.070 orang (72,42%) dari total DPT 125.753 orang, sementara pada pilkada tahun 2018 partisipasi pemilih sebanyak 66.628 (58,39%) orang dari total DPT 114.111 orang. Pada Pilkada Tahun 2013 partisipasi pemilih cukup tinggi yaitu sebesar 72,42%. Hal ini menjadikan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2013 Kota Bontang menduduki peringkat pertama dari Kab/Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara pada Pilkada Tahun 2018 partisipasi pemilih menurun hanya sebesar 58,39%. Hal ini menjadikan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2018 Kota Bontang menduduki peringkat keempat dari Kab/Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Timur.

kerja sama dengan pemerintah setempat, media massa elektronik, dan media social. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam kesiapan dalam meningkatkan partisipasi politik adalah keterbatasan aktor dalam melaksanakan sosialisasi, dan masih adanya masyarakat yang bersifat apatis terhadap politik.

Kata kunci : Sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: vichtormengi19@gmail.com

²Dosen Pembimbing 1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³Dosen Pembimbing 2 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Mulawarman

Pendahuluan

Keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”, Kota Bontang dari hasil penelitian ada perbedaan yang signifikan antara pemilu tahun 2013 dan tahun 2018. Jumlah daftar pemilih tetap pada Pilkada tahun 2013 sebanyak 125.753 orang, sementara pada tahun 2018 sebanyak 114.111 orang. jika dibandingkan lebih banyak 11.642 orang daftar pemilih tetap Pilkada Tahun 2013 dibandingkan Pilkada Tahun 2018. Pada Pilkada Tahun 2013 di Kota Bontang partisipasi pemilih sebanyak 91.070 orang (72,42%) dari total DPT 125.753 orang, sementara pada pilkada tahun 2018 partisipasi pemilih sebanyak 66.628 (58,39%) orang dari total DPT 114.111 orang. Pada Pilkada Tahun 2013 partisipasi pemilih cukup tinggi yaitu sebesar 72,42%. Hal ini menjadikan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2013 Kota Bontang menduduki peringkat pertama dari Kab/Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara pada Pilkada Tahun 2018 partisipasi pemilih menurun hanya sebesar 58,39%. Hal ini menjadikan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2018 Kota Bontang menduduki peringkat keempat dari Kab/Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Undang-Undang tersebut juga telah menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum

Undang-Undang tersebut juga telah menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota kepada masyarakat

KPU kota Bontang yang menargetkan partisipasi politik pemilih sebesar 80 % (persen) namun realisasinya hanya mencapai 58% (persen). Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum

Undang-Undang tersebut juga telah menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota kepada masyarakat

KPU kota Bontang yang menargetkan partisipasi politik pemilih sebesar 80 % (persen) namun realisasinya hanya mencapai 58% (persen) faktor yang ketiga adalah dari masyarakat itu sendiri yang kurang kesadaran dan respon dalam menyambut pesta rakyat walaupun situasi yang sudah aman dan kondusif. Beberapa faktor ini lah yang membuat tingkat partisipasi politik meen jadi rendah dan tingkat golput menjadi tinggi. (Media kaltim.tribunnews.com/2018/06/28/46 ribu warga bontang golput partisipasi pemilih pilgub turun 5 %(persen) pemilih, dan faktor yang ketiga adalah dari masyarakat itu sendiri yang kurang kesadaran dan respon dalam menyambut pesta rakyat walaupun situasi yang sudah aman dan kondusif. Beberapa faktor ini lah yang membuat tingkat partisipasi politik meen jadi rendah dan tingkat golput menjadi tinggi. (Media kaltim.tribunnews.com/2018/06/28/46 ribu warga bontang golput partisipasi pemilih pilgub turun 5 %(persen)

Kerangka Dasar Teori

Sosialisasi

Peter Ludwig Berger (dalam Sunarto, 1993:27) menggambarkan sosialisasi sebagai *“a process by which a child learns to be a participant member of society”*. (proses melalui di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat). Kemudian, David A. Goslin (dalam Ihrom, 2004: 30) berpendapat *“sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat”*.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur kaltim tahun 2018, tindakan yang dilakukan yaitu berupa sosialisasi dan partisipasi pemilih pemula. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU tersebut maka dapat dilihat dari materi sosialisasi, sasaran sosialisasi, serta metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU dengan pedoman pelaksanaan sosialisasi pemilukada yaitu berupa peraturan KPU No. 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tujuan Sosialisasi KPU Kota Bontang

Berikut tujuan sosialisasi KPU Kota Bontang:

1. KPU Kota Bontang melakukan sosialisasi partisipasi politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Kalimantan Timur melalui beberapa segmentasi, yang 3 diantaranya yaitu sosialisasi kepada warga Binaan Lapas (Narapidana) Kota Bontang, sosialisasi kepada pelajar atau pemilih pemula, dan sosialisasi kepada warga yang berada di wilayah pesisir Kota Bontang.
2. Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 menurun dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013. Data

3. partisipasi pemilih pada tahun 2018 sebesar 66.628 (58,39%), sementara pemilu tahun 2013 partisipasi pemilih mencapai 91.070 (72,42%)
4. KPU Kota Bontang memberikan pelatihan kepada masyarakat yang wilayahnya masih cukup sulit untuk dijangkau, yang nantinya perwakilan masyarakat ini yang telah diberikan pelatihan menjadi ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi diwilayahnya.
5. Faktor pendukung dalam partisipasi politik yaitu adanya kerja sama dengan organisasi masyarakat yang bergerak mengamati perilaku sosial masyarakat, sehingga dengan dilakukannya kerja sama itu akan memudahkan kinerja dari Kpu Kota Bontang dalam mensosialisasikan aspek-aspek penting yang perlu diketahui oleh segala segmen maupun unsur masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam partisipasi politik yaitu target sosialisasi yang salah, tingkat individualisme masyarakat kota Bontang masih tinggi yang dilihat dari antara masyarakat perumahan menengah ke atas dan menengah kebawah.

Faktor yang Mempengaruhi Sosialisasi KPU Kota Bontang

KPU Kota Bontang melakukan sosialisasi partisipasi politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Kalimantan Timur melalui beberapa segmentasi, yang 3 diantaranya yaitu sosialisasi kepada warga Binaan Lapas (Narapidana) Kota Bontang, sosialisasi kepada pelajar atau pemilih pemula, dan sosialisasi kepada warga yang berada di wilayah pesisir Kota Bontang. Faktor yang menjadi penghambat KPU Kota Bontang dalam meningkatkan partisipasi politik dipemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur adalah Faktor yang menjadi penghambat KPU Kota Bontang dalam meningkatkan partisipasi politik dipemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur adalah kurangnya kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai warga Negara yang baik memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, dan kegiatan politik menjadi tolak ukur seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Faktor yang menjadi pendukung KPU Kota Bontang dalam Sosialisasi dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Faktor yang menjadi pendukung KPU Kota Bontang dalam Sosialisasi dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur salah satunya yaitu Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk menggerakkan lapisan masyarakat. Faktor yang menjadi pendukung KPU Kota Bontang dalam Sosialisasi dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Faktor yang menjadi pendukung KPU Kota Bontang dalam Sosialisasi dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur salah satunya yaitu Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk menggerakkan lapisan masyarakat. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Acis Maily Puspa selaku penanggung jawab divisi sosialisasi dan

partisipan masyarakat

faktor pendukung sosialisasi KPU Kota Bontang yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai seperti adanya pengawasan dan koordinasi dari pemerintah lokal dan tokoh-tokoh masyarakat yang mampu meminimalisir dan mengendalikan dampak merugikan dari kelompok-kelompok kepentingan yang ingin mencari keuntungan pribadi sehingga mampu menggerakkan berbagai lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Acis Maily Puspa selaku penanggung jawab divisi sosialisasi dan partisipan masyarakat faktor pendukung sosialisasi KPU Kota Bontang yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai seperti adanya pengawasan dan koordinasi dari pemerintah lokal dan tokoh-tokoh masyarakat yang mampu meminimalisir dan mengendalikan dampak merugikan dari kelompok-kelompok kepentingan yang ingin mencari keuntungan pribadi sehingga mampu menggerakkan berbagai lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat utama dalam sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang yaitu kurangnya kesadaran politik masyarakatnya dan juga kesibukan sehari-hari dan pengaruh dari lingkungan keluarga yang apatis terhadap politik dan berakibat kurangnya partisipasi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan KPU untuk proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Faktor yang menjadi penghambat KPU Kota Bontang dalam meningkatkan partisipasi politik dipemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur adalah Faktor yang menjadi penghambat KPU Kota Bontang dalam meningkatkan partisipasi politik dipemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur adalah kurangnya kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai warga Negara yang baik memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, dan kegiatan politik menjadi tolak ukur seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat utama dalam sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang yaitu kurangnya kesadaran politik masyarakatnya dan juga kesibukan sehari-hari dan pengaruh dari lingkungan keluarga yang apatis terhadap politik dan berakibat kurangnya partisipasi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan KPU untuk proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 menurun dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013. Data

Sosialisasi KPU Kota Bontang (Vichtr Valentino Mengi)

partisipasi pemilih pada tahun 2018 sebesar 66.628 (58,39%), sementara pemilu tahun 2013 partisipasi pemilih mencapai 91.070 (72,42%).

KPU Kota Bontang memberikan pelatihan kepada masyarakat yang wilayahnya masih cukup sulit untuk dijangkau, yang nantinya perwakilan masyarakat ini yang telah diberikan pelatihan menjadi ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi di wilayahnya. Faktor pendukung dalam partisipasi politik yaitu adanya kerja sama dengan organisasi masyarakat yang bergerak mengamati perilaku sosial masyarakat, sehingga dengan dilakukannya kerja sama itu akan memudahkan kinerja dari KPU Kota Bontang dalam mensosialisasikan aspek-aspek penting yang perlu diketahui oleh segala segmen maupun unsur masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam partisipasi politik yaitu target sosialisasi yang salah, tingkat individualisme masyarakat kota Bontang masih tinggi yang dilihat dari antara masyarakat perumahan menengah ke atas dan menengah kebawah.

KPU Kota Bontang

KPU Kota Bontang memprogramkan khusus sosialisasi di pesisir Bontang yang berada di wilayah terluar atau jauh dari kota. Diketahui pembangunan infrastruktur maupun listrik masih kurang, sehingga hal itu berdampak pada minimnya informasi yang masuk ke wilayah pesisir kota Bontang, salah satunya informasi mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Kota Bontang memprogramkan khusus sosialisasi di pesisir Bontang yang berada di wilayah terluar atau jauh dari kota.

Diketahui pembangunan infrastruktur maupun listrik masih kurang, sehingga hal itu berdampak pada minimnya informasi yang masuk ke wilayah pesisir kota Bontang, salah satunya informasi mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal inilah yang menjadi dasar dan alasan dilakukannya sosialisasi secara khusus di wilayah pesisir. KPU Kota Bontang menysasar masyarakat umum, pemilih pemula (pelajar) yang ada di Kota Bontang. Tidak hanya masyarakat umum di daerah yang mudah dijangkau saja, tetapi masyarakat umum di daerah yang sulit dijangkau seperti di daerah pesisir.

Artinya KPU Kota Bontang berusaha untuk merata dalam hal melakukan sosialisasi Pemilu. Selain itu KPU Kota Bontang juga secara masif menysasar warga internet sebagai sasaran sosialisasi politik. KPU Kota Bontang memprogramkan khusus sosialisasi di pesisir Bontang yang berada di wilayah terluar atau jauh dari kota. Diketahui pembangunan infrastruktur maupun listrik masih kurang, sehingga hal itu berdampak pada minimnya informasi yang masuk ke wilayah pesisir kota Bontang, salah satunya informasi mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal inilah yang menjadi dasar dan alasan dilakukannya sosialisasi secara khusus di wilayah pesisir. KPU Kota Bontang menysasar masyarakat umum, pemilih pemula (pelajar) yang ada di Kota Bontang. Tidak hanya masyarakat umum di daerah yang mudah dijangkau saja, tetapi masyarakat umum di daerah yang sulit dijangkauperti di daerah pesisir. Artinya KPU Kota Bontang berusaha untuk merata dalam hal melakukan sosialisasi Pemilu. Selain itu KPU Kota Bontang juga

secara masif menyasar warga internet sebagai sasaran sosialisasi politik.. Hal inilah yang menjadi dasar dan alasan dilakukannya sosialisasi secara khusus di wilayah pesisir.

KPU Kota Bontang menyasar masyarakat umum, pemilih pemula (pelajar) yang ada di Kota Bontang. Tidak hanya masyarakat umum di daerah yang mudah dijangkau saja, tetapi masyarakat umum di daerah yang sulit dijangkau seperti di daerah pesisir. Artinya KPU Kota Bontang berusaha untuk merata dalam hal melakukan sosialisasi Pemilu. Selain itu KPU Kota Bontang juga secara masif menyasar warga internet sebagai sasaran sosialisasi politik.

Partisipasi Pemilih Kota Bontang

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Bontang pada tahun 2018 terdapat 275 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di tiga Kecamatan di seluruh Kota Bontang dari hasil penelitian ada perbedaan yang signifikan antara pemilu tahun 2013 dan tahun 2018. Jumlah daftar pemilih tetap pada Pilkada tahun 2013 sebanyak 125.753 orang, sementara pada tahun 2018 sebanyak 114.111 orang. jika dibandingkan lebih banyak 11.642 orang daftar pemilih tetap Pilkada Tahun 2013 dibandingkan Pilkada Tahun 2018. Pada Pilkada Tahun 2013 di Kota Bontang partisipasi pemilih sebanyak 91.070 orang (72,42%) dari total DPT 125.753 orang, sementara pada pilkada tahun 2018 partisipasi pemilih sebanyak 66.628 (58,39%) orang dari total DPT 114.111 orang.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Bontang pada tahun 2018 terdapat 275 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di tiga Kecamatan di seluruh Kota Bontang dari hasil penelitian ada perbedaan yang signifikan antara pemilu tahun 2013 dan tahun 2018. Jumlah daftar pemilih tetap pada Pilkada tahun 2013 sebanyak 125.753 orang, sementara pada tahun 2018 sebanyak 114.111 orang. jika dibandingkan lebih banyak 11.642 orang daftar pemilih tetap Pilkada Tahun 2013 dibandingkan Pilkada Tahun 2018. Pada Pilkada Tahun 2013 di Kota Bontang partisipasi pemilih sebanyak 91.070 orang (72,42%) dari total DPT 125.753 orang, sementara pada pilkada tahun 2018 partisipasi pemilih sebanyak 66.628 (58,39%) orang dari total DPT 114.111 orang. Pada Pilkada Tahun 2013 partisipasi pemilih cukup tinggi yaitu sebesar 72,42%.

Hal ini menjadikan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2013 Kota Bontang menduduki peringkat pertama dari Kab/Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara pada Pilkada Tahun 2018 partisipasi pemilih menurun hanya sebesar 58,39%. Hal ini menjadikan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2018 Kota Bontang menduduki peringkat keempat dari Kab/Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Bontang pada tahun 2018 terdapat 275 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di tiga Kecamatan di seluruh Kota Bontang dari hasil penelitian ada perbedaan yang signifikan antara pemilu tahun 2013 dan tahun 2018.

Jumlah daftar pemilih tetap pada Pilkada tahun 2013 sebanyak 125.753 orang, sementara pada tahun 2018 sebanyak 114.111 orang. jika dibandingkan lebih banyak 11.642 orang daftar pemilih tetap Pilkada Tahun 2013 dibandingkan Pilkada

Tahun 2018. Pada Pilkada Tahun 2013 di Kota Bontang partisipasi pemilih sebanyak 91.070 orang (72,42%) dari total DPT 125.753 orang, sementara pada pilkada tahun 2018 partisipasi pemilih sebanyak 66.628 (58,39%) orang dari total DPT 114.111 orang.

Pada Pilkada Tahun 2013 partisipasi pemilih cukup tinggi yaitu sebesar 72,42%. Hal ini menjadikan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2013 Kota Bontang menduduki peringkat pertama dari Kab/Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara pada Pilkada Tahun 2018 partisipasi pemilih menurun hanya sebesar 58,39%. Hal ini menjadikan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2018 Kota Bontang menduduki peringkat keempat dari Kab/Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Timur. Pada Pilkada Tahun 2013 partisipasi pemilih cukup tinggi yaitu sebesar 72,42%. Hal ini menjadikan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2013 Kota Bontang menduduki peringkat pertama dari Kab/Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara pada Pilkada Tahun 2018 partisipasi pemilih menurun hanya sebesar 58,39%. Hal ini menjadikan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2018 Kota Bontang menduduki peringkat keempat dari Kab/Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif penelitian ini berdasarkan data yang sistematis dan akurat atas fakta dan fenomena yang ada di lapangan untuk menemukan fakta atas Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian berujuan untuk lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan juga sebagai batasan atas data-data yang ingin diperoleh agar tidak terlalu meluas. Berikut ini fokus penelitian dari Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2018:

1. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang Dalam rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 dengan indikator tupoksi berdasarkan peraturan KPU No. 5 Tahun 2015 dan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi warga binaan
 - b. Sosialisasi pemilih pemula
 - c. Sosialisasi di wilayah pesisir
2. Partisipasi pemilih
3. Faktor penghambat dan pendukung dalam sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wwakil Gubernur Kalimantan Timur.

Hasil Penelitian

Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Dalam Rangka Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018

Sosialisasi

Dalam kegiatannya KPU Kota Bontang telah melakukan beberapa sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi politik di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yaitu :

1. Sosialisasi pada warga binaan Lembaga pemasyarakatan Kota Bontang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 KPU Kota Bontang melakukan Sosialisasi di Lapas Kelas IIA Kota Bontang. Tujuan atau sasaran dari Sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 kepada warga binaan Lapas Kota Bontang agar tidak Golput Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menggunakan metode sosialisasi secara tatap muka dengan langsung mendatangi lapas kota bontang.

2. Sosialisasi Pemilih Pemula (Pelajar)

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 KPU Kota Bontang melakukan Sosialisasi di Sekolah-sekolah seperti SMA dan SMK di Kota Bontang. Tujuan atau sasaran dari Sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 kepada warga binaan Lapas Kota Bontang agar tidak Golput Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menggunakan metode sosialisasi secara tatap muka dengan langsung mendatangi lapas kota bontang.

3. Sosialisasi di Wilayah Pesisir

KPU Kota Bontang memprogramkan khusus sosialisasi di pesisir Bontang yang berada di wilayah terluar atau jauh dari kota. Diketahui pembangunan infrastruktur maupun listrik masih kurang, sehingga hal itu berdampak pada minimnya informasi yang masuk ke wilayah pesisir kota bontang, salah satunya informasi mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal inilah yang menjadi dasar dan alasan dilakukannya sosialisasi secara khusus di wilayah pesisir. KPU Kota Bontang menyasar masyarakat umum, pemilih pemula (pelajar) yang ada di Kota Bontang. Tidak hanya masyarakat umum di daerah yang mudah dijangkau saja, tetapi masyarakat umum di daerah yang sulit dijangkau seperti di daerah pesisir. Artinya KPU Kota Bontang berusaha untuk merata dalam hal melakukan sosialisasi Pemilu. Selain itu KPU Kota Bontang juga secara masif menyasar warga internet sebagai sasaran sosialisasi politik.

Partisipasi Pemilih

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Bontang pada tahun 2018 terdapat 275 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di tiga Kecamatan di seluruh Kota Bontang dari hasil penelitian ada perbedaan yang signifikan antara pemilu tahun 2013 dan tahun 2018. Jumlah daftar pemilih tetap pada Pilkada tahun 2013 sebanyak 125.753 orang, sementara pada tahun 2018 sebanyak 114.111 orang. jika dibandingkan lebih banyak 11.642 orang daftar pemilih tetap Pilkada Tahun 2013 dibandingkan Pilkada Tahun 2018. Pada Pilkada Tahun

DPT 125.753 orang, sementara pada pilkada tahun 2018 partisipasi pemilih sebanyak 66.628 (58,39%) orang dari total DPT 114.111 orang. Pada Pilkada Tahun 2013 partisipasi pemilih cukup tinggi yaitu sebesar 72,42%. Hal ini menjadikan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2013 Kota Bontang menduduki peringkat pertama dari Kab/Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara pada Pilkada Tahun 2018 partisipasi pemilih menurun hanya sebesar 58,39%. Hal ini menjadikan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2018 Kota Bontang menduduki peringkat keempat dari Kab/Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor Pendukung dan Penghambat KPU Kota Bontang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018

Faktor Pendukung

Faktor yang menjadi pendukung KPU Kota Bontang dalam Sosialisasi dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Faktor yang menjadi pendukung KPU Kota Bontang dalam Sosialisasi dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur salah satunya yaitu Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk menggerakkan lapisan masyarakat. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Acis Maily Puspa selaku penanggung jawab divisi sosialisasi dan partisipan masyarakat

faktor pendukung sosialisasi KPU Kota Bontang yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai seperti adanya pengawasan dan koordinasi dari pemerintah lokal dan tokoh-tokoh masyarakat yang mampu meminimalisir dan mengendalikan dampak merugikan dari kelompok-kelompok kepentingan yang ingin mencari keuntungan pribadi sehingga mampu menggerakkan berbagai lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi

Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat KPU Kota Bontang dalam meningkatkan partisipasi politik dipemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur adalah Faktor yang menjadi penghambat KPU Kota Bontang dalam meningkatkan partisipasi politik dipemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur adalah kurangnya kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai warga Negara yang baik memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, dan kegiatan politik menjadi tolak ukur seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik: dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat utama dalam sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang yaitu kurangnya kesadaran politik masyarakatnya dan juga kesibukan sehari-hari dan pengaruh dari lingkungan keluarga yang apatis

terhadap politik dan berakibat kurangnya partisipasi untuk mengikuti kegiatan

sosialisasi yang diadakan KPU untuk proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. KPU Kota Bontang melakukan sosialisasi partisipasi politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Kalimantan Timur melalui beberapa segmentasi, yang 3 diantaranya yaitu sosialisasi kepada warga Binaan Lapas (Narapidana) Kota Bontang, sosialisasi kepada pelajar atau pemilih pemula, dan sosialisasi kepada warga yang berada di wilayah pesisir Kota Bontang.
2. Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 menurun dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013. Data partisipasi pemilih pada tahun 2018 sebesar 66.628 (58,39%), sementara pemilu tahun 2013 partisipasi pemilih mencapai 91.070 (72,42%)
3. KPU Kota Bontang memberikan pelatihan kepada masyarakat yang wilayahnya masih cukup sulit untuk dijangkau, yang nantinya perwakilan masyarakat ini yang telah diberikan pelatihan menjadi ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi di wilayahnya.
4. Faktor pendukung dalam partisipasi politik yaitu adanya kerja sama dengan organisasi masyarakat yang bergerak mengamati perilaku sosial masyarakat, sehingga dengan dilakukannya kerja sama itu akan memudahkan kinerja dari Kpu Kota Bontang dalam mensosialisasikan aspek-aspek penting yang perlu diketahui oleh segala segmen maupun unsur masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam partisipasi politik yaitu target sosialisasi yang salah, tingkat individualisme masyarakat kota Bontang masih tinggi yang dilihat dari antara masyarakat perumahan menengah ke atas dan menengah kebawah.

Saran

1. KPU Kota Bontang perlu menambah Sumber Daya Manusi (SDM) yang lebih banyak agar dalam melakukan sosialisasi dapat merata keberbagai tingkatan masyarakat.
2. Jika dibandingkan antara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dan Tahun 2018, ada penurunan partisipasi pemilih sehingga penulis menyarankan agar Kpu Kota Bontang menargetkan partisipasi pemilih yang tinggi, yaitu dengan membuat perencanaan yang baik, dan gencar melakukan sosialisasi secara masif dengan menargetkan dan meningkatkan sumber daya yang ada.
3. Kepada masyarakat Kota Bontang khususnya yang masih dalam usia pemilih untuk dapat aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik yaitu pemilihan-pemilihan umum, mulai dari tingkat pemilihan RT sampai kepada

Sosialisasi KPU Kota Bontang (Vichor Valentino Mengi) pemilihan Presiden, karna partisipasi dari masyarakat menentukan masa depan bangsa.

4. Memperkuat narasi solidaritas sosial, gotong royong, dan empati masyarakat antar perumahan menengah atas dan menengah bawah yang dimana bisa melakukan
5. sosialisasi bersama sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meningkat.
6. Dalam sosialisasi dan Pendidikan pemilih pemula atau pelajar seharusnya dilakukan berkesinambungan, tidka hanya pada saat pemilu/pilkada tetapi setiap tahun seharusnya menjadi rutinitas yang baru dikerjakan.

Daftar Pustaka

Buku

- Andrew Reynolds, “ *Merancang Sistem Pemilihan Umum*” dalam Juan J. Linz, *et.al., Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, (Bandung: Mizan, 2001). Hal : 102. 1, 1–35.
- Liando, D. M. (2016). *PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*, 3, 14–28.
- Maslekeh Pratama Putri. (2016). *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur*, 4(1), 30–43.
- Moleong, L.J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi. Revisi. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Muluk, MR Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Berfikir Sistem)*. Bayu Media Malang.

Dokumen

- Undang-undang No.15Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.